

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. (2008). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Ragkaian Pemikira Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asikin, A. d. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadjar, I. (1996). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harahap, K. (2008). *Acara Perdata*. Bandung: PT. Grafiti Budi Utami.
- Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2007). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana.
- Jamin, M. (1995). *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Konoras, A. (2017). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. Depok: PT Raja Grifindo Persada.
- Margono, S. (2004). *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1979). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusuo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Narbuko Cholid, d. A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.

- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramadan, I. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan peradilan Mahkamah Agung RI.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press.
- Rumadan, I. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
- Subekti. (1977). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukadana, I. M. (2012). *Mediasi Peradilan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Triana, S. (2010). Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008. *Jurnal Penelitian* Volume 7, 2.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.

#### **Artikel dalam Jurnal**

- Alamul Yaqin, U. T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Perdata di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan (Studi No. 13/Pdt.G/2019/PN.PKL). *Journal of Islamic Economic Law, Vol. 1*, 121-125
- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 271-282.
- FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Royo pada Jaminan Fidusia Kendaraan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 221-228.

- Karim, K., & Abdillah, A. R. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 119-130.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.
- Kusen, S. A. (2016). Hakekat Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri. *Lex Crimen*, 5(6), Vol. V.
- Lomban, R. (2013). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi. *Lex Privatum*, 1(4), Vol. I
- Nugraha, I. M. J. W., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Pelanggan Terhadap Pt. Mensana Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak Di Pt. Mensana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 209-219.
- Ompusunggu, I. G. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Lex Crimen Vol. IX*, 72.
- Sambe, K. M. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*, Vol. X.
- Warankiran, E. A. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Cara Mediasi Di Pengadilan Negeri. *Lex Administratum*, Vol. III, 69-71.
- Wardani, N. K. D. Y. A., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 60-67.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), Vol. 15, 275-299.

Rosy, K. O., Sudika, D. G., & Yuliantini, N. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra. *Ganesha Law Review, Volume 2*(Issue 2), 162-164

### **Skripsi**

Ridho, M. (2022). Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Fatayat, F. A. (2023). Pelaksanaan Mediasi Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 212/Pdt. G/2021/Pn Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 130 dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 154

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.